

**BAGIAN ANGGARAN 018  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**LAPORAN KEUANGAN  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

*Kompleks Pertanian Kusu Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan  
E-mail: uappabw\_malut@yahoo.com*

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Catatan atas Laporan Keuangan	4
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Kebijakan Teknis	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Aset Lancar	23
C.2. Aset Tetap	23
C.3. Kas Lain Setara Kas	24
C.4. Belanja di Bayar di Muka	25
C.5. Piutang bukan pajak	26
C.6. Bagian Lancar	26
C.7. Bagian Lancar TP TGR	26
D. Pengungkapan Penting Lainnya	35
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	36
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	37
D.4. Rekening Pemerintah	38
D.5. Pengungkapan Lain-lain	39
Laporan-laporan Pendukung	
. . . . . LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
. . . . . LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
. . . . . Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	



	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Catatan atas Laporan Keuangan	4
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Kebijakan Teknis	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Aset Lancar	23
C.2. Aset Tetap	23
C.3. Kas Lain Setara Kas	24
C.4. Belanja di Bayar di Muka	25
C.5. Piutang bukan pajak	26
C.6. Bagian Lancar	26
C.7. Bagian Lancar TP TGR	26
D. Pengungkapan Penting Lainnya	35
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	36
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	37
D.4. Rekening Pemerintah	38
D.5. Pengungkapan Lain-lain	39
Laporan-laporan Pendukung	
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**KEPALA SEKRETARIAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU**  
**PENGGUNA ANGGARAN /BARANG- WILAYAH**  
**MALUKU UTARA**

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tingkat wilayah selaku UAPPA/B-W yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA/B.

Laporan ini adalah merupakan hasil gabungan dari semua satker penerima dana Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Sofifi**, 23 Januari 2014

**Kuasa Pengguna Anggaran**

Kepala Sekretariat UAPPA/B-W Maluku Utara

Dr.Andriko Noto Susanto,SP.MP

NIP. 19720515 199803 1 004

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012	1
Tabel 2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran KD	2
Tabel 3 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DK	2
Tabel 4 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DK	2
Tabel 5 : Rincian Neraca TA.2013 dan 2012	3
Tabel 6 : Rincian Neraca TA.2013 dan 2012 KD	3
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012	5
Tabel 8 : Rekapitulasi Satker UAPPABW	10
Tabel 9 : Daftar Satker 2013	11
Tabel 10 : Penggolongan Piutang	17
Tabel 11 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 12 : Estimasi dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel 13 : Rincian LRA3013	20
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja	21
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	21
Tabel 16 : Perbandingan Belanja Barang	22
Tabel 17 : Perbandingan Belanja Modal	22
Tabel 18 : Rincian Aset Lancar	23
Tabel 19 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	23
Tabel 20 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	24
Tabel 21 : Rincian Kas lain setara kas	24
Tabel 22 : Rincian Kas lain setara kas	25
Tabel 23 : Rincian belanja di bayar dimuka	25
Tabel 24 : Rincian belanja di bayar dimuka	26
Tabel 25 : Rincian Aset Tetap	27
Tabel 26 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
Tabel 27 : Rincian TP TGR	30
Tabel 28 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	31

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah  
Rp573.112.168

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp573.112.168. Pendapatan Negara lingkup UAPPABW Maluku Utara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2013		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Hasil Pertanian	27,460,000	68,422,000	99.5
2. Pendapatan sewa		12,680,150	100.1
3. Pengembalian TAYL		172,407,521	
4. Penjualan Dokumen lelang		500,000	
5. Pemindatangan BMN		6,800,000	
6. Pendapatan Sensor Karantina		245,434,853	
7. Pendapatan lain-lain		66,498,210	
8. Jasa Giro		369,434	
<b>Jumlah</b>	<b>27,460,000</b>	<b>573,112,168</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada TA 2013 mengalami kenaikan dari realisasi pendapatan dari PNB TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya aktifitas jasa sewa fasilitas gedung dan bangunan;

Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pendapatan Lain-lain sebesar Rp66.498.210 merupakan pendapatan dari jasa lembaga keuangan, pengembalian belanja pegawai dan pengembalian belanja lainnya tahun anggaran yang lalu.

### B.2. Belanja Negara

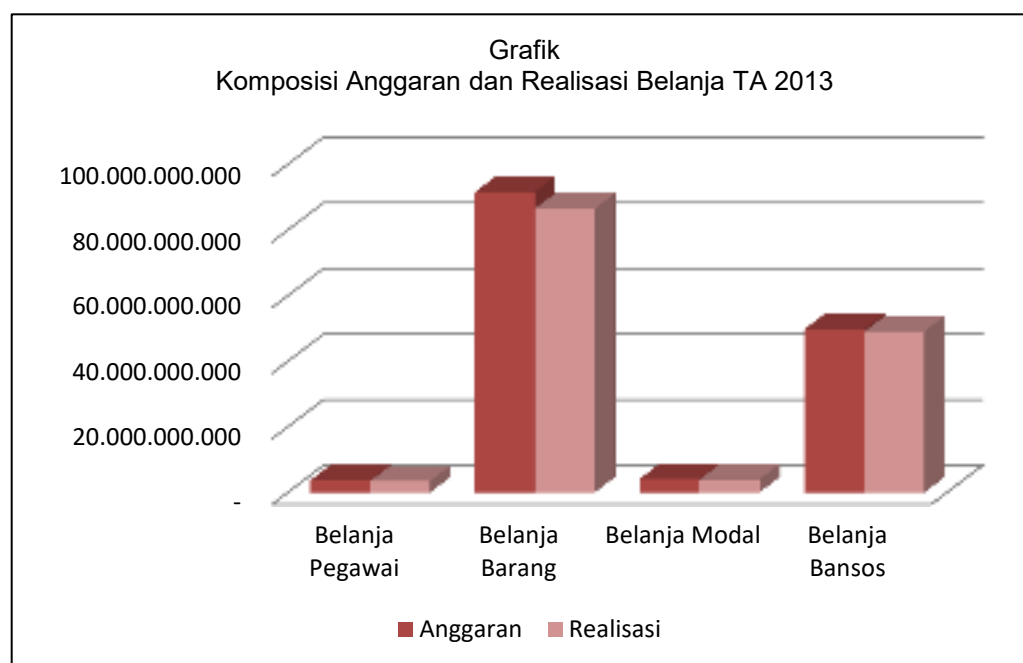
Realisasi  
Belanja Negara  
Rp143.067.873.  
315

Realisasi belanja lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Provinsi Maluku Utara pada TA 2013 adalah sebesar Rp143.067.873.315. atau sebesar 95.83 persen dari anggaran senilai Rp149.300.494.000. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,717,965,000	3,459,693,622	93.05
Belanja Barang	91,570,848,000	86,497,480,299	94.46
Belanja Modal	4,188,401,000	4,000,289,394	95.51
Bantuan Sosial	49,823,280,000	49,110,410,000	98.57
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>149,300,494,000</b>	<b>143,067,873,315</b>	<b>95.83</b>
Pengembalian Belanja			<b>0</b>
<b>Belanja Netto</b>	<b>149,300,494,000</b>	<b>143,067,873,315</b>	<b>95.83</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami Penurunan sebesar 7.99 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan berkaitan dengan mutasi pegawai pada BPTP Maluku Utara
2. Perampangan Jumlah Satker Lingkup UAPPABW yang berdampak pada pengurangan Pagu Belanja Bansos ;

Tabel 14  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,459,693,622	3,534,804,054	(2.12)
Belanja Barang	86,497,480,299	75,112,397,387	15.16
Belanja Modal	4,000,289,394	3,387,424,500	18.09
Bantuan Sosial	49,110,410,000	73,449,257,000	(33.14)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>143,067,873,315</b>	<b>155,483,882,941</b>	<b>(7.99)</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai  
Rp3.459.693.622  
2

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi belanja pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp3.459.693.622. dan Rp3.534.804.054 Berdasarkan Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012, realisasi belanja TA 2013 mengalami penurunan sebesar 2.12 persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.
2. Adanya mutasi pegawai ke unit dan instansi lain.

Tabel 15  
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 3,459,693,622	Rp 3,534,804,054	(2.12)
Belanja Honorarium			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 3,459,693,622</b>	<b>Rp 3,534,804,054</b>	<b>(2.12)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai			#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 3,459,693,622</b>	<b>Rp 3,534,804,054</b>	<b>(2.12)</b>

Belanja Barang  
Rp86.497.480.299  
99

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp86.497.480.299. dan Rp75.112.397.387.

Berdasarkan Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan 15.16 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain sebagian anggaran terpusat di Provinsi misalnya, Kegiatan Hortikultura,PSP,PPHP sehingga memudahkan koordinasi dan proses pencairan anggaran



Tabel 16  
Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2013	REALISASI T.A. 2012	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3,327,180,267	3,055,644,000	8.89
Belanja Barang Non Operasional	31,237,781,608	35,048,009,600	(10.87)
Belanja Jasa	2,153,988,885	2,653,004,000	(18.81)
Belanja Pemeliharaan	1,471,354,885	925,481,000	58.98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20,606,880,754	25,403,810,000	(18.88)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>58,797,186,399</b>	<b>67,085,948,600</b>	<b>(12.36)</b>
Pengembalian Belanja			
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>58,797,186,399</b>	<b>67,085,948,600</b>	<b>(12.36)</b>

Belanja Modal  
Rp4.000.289.39  
4

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp4.000.289.394 dan Rp2.941.389.300.

Tabel 17  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A 2012	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,990,239,394	2,719,622,200	(26.82)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,667,950,000	1,656,188,700	0.71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	312,200,000		#DIV/0!
Belanja Modal Fisik Lainnya	29,900,000	11,950,550,000	(99.75)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4,000,289,394</b>	<b>16,326,360,900</b>	<b>(75.50)</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>4,000,289,394</b>	<b>16,326,360,900</b>	<b>(75.50)</b>

Belanja Bantuan  
Sosial  
Rp4.613.659.500

### B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp49.110.410.000. dan Rp77.408.450.000.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penanggung Jawab UAPPA Wilayah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat wilayah yang ada dibawahnya.

UAPPA/B-W Maluku Utara adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan UAPPA/B-W Maluku Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2013 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2013 untuk Kantor Daerah adalah sebesar Rp.372.920.300,- atau 13.650 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2013 sebesar Rp.27.400.000,- Dekonsentrasi adalah sebesar Rp.65.182.746,- dari yang ditetapkan dalam DIPA TA. 2013 sebesar Rp.0,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.135.009.122,- dari yang ditetapkan dalam DIPA TA. 2013 sebesar Rp.0,- Sementara itu, realisasi Belanja Negara untuk Kantor Daerah adalah sebesar Rp.14.586.905.698,- atau 94.24 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp.15.478.936.000,- untuk realisasi Dekonsentrasi adalah sebesar Rp.27.555.844.750,- atau 99.91 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp.27.580.086.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.100.925.122.867,- atau 95.00 persen dari yang di anggarkan dalam DIPA tahun 2013 sebesar Rp.106.241.472.000,-. Dengan demikian maka total realisasi untuk Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 143.067.873.315,- atau 95.83 persen.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas

kementerian negara/lembaga periode 31 Desember 2013. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Kantor Daerah adalah sebesar Rp. 28.824.650.301 dan Kewajiban sebesar Rp. 18.174.500,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) KD sebesar Rp.28.864.739.513, Nilai Aset Dekon adalah sebesar Rp. 8.419.561.099,- dan kewajiban sebesar Rp.1.0000.000,- sehingga Jumlah Ekuitas Dana Dekon Rp. 8.418.561.099,- Sedangkan nilai aset Tugas Pembantuan sebesar Rp. 24.456.141.931,- dan kewajiban Rp. 29.043.503,- sehingga Jumlah Ekuitas Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 24.447.287.231.-

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
4. Laporan keuangan UAPPA/B-W Maluku Utara ini berstatus sebagai laporan keuangan yang belum diperiksa (unaudited).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode 31 Desember 2013 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

**Sofifi**, 23 Januari 2014

**Kuasa Pengguna Anggaran**

Kepala Sekretariat UAPPA/B-W Maluku Utara

Dr. Andriko Noto Susanto, SP.MP

NIP. 19720515 199803 1 004

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPABW) Maluku Utara Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.573.112.168. dari estimasi pendapatannya sebesar Rp27.460.000.

Realisasi Belanja Negara Lingkup UAPPA/B-W Provinsi Maluku Utara pada TA 2013 adalah sebesar Rp.143.067.873.315. atau mencapai 95,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.149.300.494.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012  
(dalam Rupiah)*

Uraian	2013			2012
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	27.460.000	573.112.168	2.087	593.994.757
Belanja Negara	149.300.494.000	143.067.873.315	95,83	155.483.882.941

Tabel 2  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2013  
(Kantor Daerah)

Uraian	2013			2012
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	27.460.000	372.920.300	1.358	58.572.676,
Belanja Negara	149.300.494.000	143.067.873.315	95,83	155.483.882.941

Tabel 3  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2013  
(Dekonsentrasi)

Uraian	2013			2012
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara		65.182.746		7.240.430
Belanja Negara	27.580.086.000	27.555.844.750	99,91	29.658.044

Tabel 4  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2013  
(Tugas Pembantuan)

Uraian	2013			2012
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara		103.168.346		5.181.651
Belanja Negara	106.241.472.000	100.925.122.867	95,00	112.773.798.700

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp61.700.353.331. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.19.097.756.115.; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp42.653.431.098; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang taktertagih) sebesar Rp.0.; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp67.617.633.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp48.218.003. yang terdiri dari hanya Kewajiban

Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp61.730.587.843 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.18.944.314.112). dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.42.721.048.731.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
*Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012*  
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2012	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	19,097,756,115	6,039,574,992	13,058,181,123	216.21
Aset Tetap	42,653,431,098	59,769,046,657	(17,115,615,559)	-28.64
Piutang Jk Panjang	-	-	-	0.00
Aset Lainnya	67,617,633	60,376,000	7,241,633	11.99
<b>Jumlah Aset</b>	<b>61,700,353,331</b>	<b>66,170,533,196</b>	<b>(4,470,179,865)</b>	<b>-6.76</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	48,218,003	29,013,436	19,204,567	66.19
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>48,218,003</b>	<b>29,013,436</b>	<b>19,204,567</b>	<b>66.19</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	18,944,314,112	5,960,454,156	12,983,859,956	217.83
Ekuitas Dana Invesrasi	42,721,048,731	60,477,894,702	(17,756,845,971)	-29.36
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>61,730,587,843</b>	<b>66,196,417,358</b>	<b>(4,465,829,515)</b>	<b>-6.75</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>61,778,805,946</b>	<b>66,229,601,560</b>	<b>(4,450,795,614)</b>	<b>-6.72</b>

**Tabel 6**  
*Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012*  
(dalam Rupiah)  
**KANTOR DAERAH**

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2012	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	59,176,712	50,382,912	8,793,800	17.45
Aset Tetap	28,756,119,668	31,825,888,925	(3,069,769,257)	-9.65
Piutang Jk Panjang	-	-	-	0.00
Aset Lainnya	67,617,633	616,411,548	(548,793,915)	-89.03
<b>Jumlah Aset</b>	<b>28,824,650,301</b>	<b>32,560,301,018</b>	<b>(3,735,650,717)</b>	<b>-11.47</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	18,174,500	14,622,600	3,551,900	24.29
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>18,174,500</b>	<b>14,622,600</b>	<b>3,551,900</b>	<b>24.29</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	41,002,212	35,760,412	5,241,800	14.66
Ekuitas Dana Invesrasi	28,823,737,301	32,509,918,106	(3,686,180,805)	-11.34
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>28,823,737,301</b>	<b>32,545,678,518</b>	<b>(3,721,941,217)</b>	<b>-11.44</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>28,882,914,113</b>	<b>32,560,301,018</b>	<b>(3,677,386,905)</b>	<b>-11.29</b>

*Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012*  
(dalam Rupiah) DK

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2012	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	14,800,000	24,322,744	(9,522,744)	-39.15
Aset Tetap	8,404,761,099	22,626,696,391	(14,221,935,292)	-62.85
Piutang Jk Panjang	-	-	-	0.00
Aset Lainnya			-	#DIV/0!
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8,419,561,099</b>	<b>22,711,019,135</b>	<b>(14,291,458,036)</b>	<b>-62.93</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	1,000,000		1,000,000	#DIV/0!
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	13,800,000	24,322,744	(10,522,744)	-43.26
Ekuitas Dana Investasi	8,404,761,099	22,651,515,255	(14,246,754,156)	-62.90
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>8,418,561,099</b>	<b>22,675,837,999</b>	<b>(14,257,276,900)</b>	<b>-62.87</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>8,419,561,099</b>	<b>22,675,837,999</b>	<b>(14,256,276,900)</b>	<b>-62.87</b>

DK

TP

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2012	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	19,023,779,403	5,964,869,336	13,058,910,067	218.93
Aset Tetap	5,492,550,331	5,316,461,341	176,088,990	3.31
Piutang Jk Panjang	-		-	0.00
Aset Lainnya			-	
<b>Jumlah Aset</b>	<b>24,456,141,931</b>	<b>10,899,213,043</b>	<b>13,556,928,888</b>	<b>124.38</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	29,043,503	14,390,836	14,652,667	101.82
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>29,043,503</b>	<b>14,390,836</b>	<b>14,652,667</b>	<b>101.82</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	18,889,511,900	5,900,371,000	12,989,140,900	220.14
Ekuitas Dana Investasi	5,492,550,331	5,316,461,341	176,088,990	3.31
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>24,447,287,231</b>	<b>10,974,900,841</b>	<b>13,472,386,390</b>	<b>122.76</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>24,476,330,734</b>	<b>10,993,462,543</b>	<b>13,482,868,191</b>	<b>122.64</b>

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI MALUKU UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Tabel 7

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA.2013		%	TA 2012
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>A.Pendapatan Negara</b>	<b>B.1</b>				
1.Penerimaan Negara Bukan Pajak		27.460.000	541.271.392		593.994.757
<b>Jumlah pendapatan Negara</b>		<b>27.460.000</b>	<b>541.271.392</b>		<b>593.994.757</b>
<b>B.Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.Belanja Pegawai	B.2.1	3.717.965.000	3.459.693.622	93.05	3.534.804.054
2.Belanja Barng	B.2.2	91.570.848.000	86.497.480.299	94.46	75.112.397.387
3.Belanja Modal	B.2.3	4.188.401.000	4.000.289.394	95.51	3.387.424.500
4.Belanja Sosial	B.2.4	49.823.280.000	49.110.410.000	98.57	73.449.257.000
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>149.300.494.000</b>	<b>143.067.873.315</b>	<b>95.83</b>	<b>155.483.882.941</b>



## II. NERACA

**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARA/BARANG  
WILAYAH PROV.MALUKU UTARATA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

( dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	28.800.000	4.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	1.242.503	10.422.702
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.4		
Piutang Bukan Pajak	C.1.5		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bag Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.8		
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.9		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10		
Persediaan	C.1.11	19.067.713.612	5.985.084.156
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>19.097.756.115</b>	<b>5.999.506.858</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	13.260.401.850	13.260.401.850
Peralatan dan Mesin	C.2.2	22.552.521.333	19.970.397.150
Gedung dan Bangunan	C.2.3	24.867.569.484	24.084.932.484
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	2.922.184.166	2.375.759.216
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	90.276.000	60.376.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(20.994.371.725)	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>42.653.431.098</b>	<b>59.769.046.657</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	C.3		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.1		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2		
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.3		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4		
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>			
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	67.617.633	67.617.633
Aset Lain-lain	C.4.2	208.152.334	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(208.152.334)	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>67.617.633</b>	67.617.633
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>63.260.096.155</b>	<b>66.170.533.196</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1		
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	28.800.000	
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3		
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.4		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>48.218.003</b>	<b>29.013.436</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>48.218.003</b>	<b>29.013.436</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

*Laporan Keuangan UAPPA/B-W Provinsi Maluku Utara Tahun 2013*

Uraian	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1		
Cadangan Persediaan	C.6.2	19.067.713.612	5.985.084.156
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.3		
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.4		
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.5		
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.6		
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>19.097.756.115</b>	5.985.084.156
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	42.633.431.098	59.769.046.657
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	67.617.633	67.617.633
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>42.721.048.731</b>	<b>60.477.894.702</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>61.730.587.843</b>	<b>66.196.417.358</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>61.778.805.946</b>	<b>66.229.601.560</b>

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

##### Dasar Hukum

##### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-...../PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

##### A.2. KEBIJAKAN TEKNIS SEKRETARIAT UAPPA/B - W PROV. MALUKU UTARA

##### Dasar dan Rencana Strategis

##### RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UAPPA/B - W PROVINSI MALUKU UTARA

Sekretariat UAPPA/B-W adalah organisasi yang bersifat *ad hoc* serta berfungsi sebagai mediator antara pimpinan Kementerian Pertanian dan pimpinan daerah dengan tujuan untuk membantu menertibkan pembuatan dan pengiriman laporan keuangan UAKPA penerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang berada di bawah tanggungjawab pimpinan daerah dan pimpinan SKPD lingkup Kementerian Pertanian di setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup kegiatan UAPPA/B-W adalah meliputi 3 hal yaitu : pembinaan dan supervisi, penyusunan dan pengriman laporan keuangan UAPPA/B-W, serta pengadaan bahan pembantu kegiatan.

Tujuan dibentuknya sekretariat UAPPA/B-W di Propinsi Maluku Utara adalah :

1. Membantu kemandirian satker (UAKPA/B) yang menerima alokasi anggaran dari bagian anggaran 018 (Kementerian Pertanian) termasuk bagian anggaran 062 diwilayah Propinsi Maluku Utara dalam menyusun dan mengirimkan laporan keuangannya.
2. Terjadi peningkatan keterampilan petugas yang terkait dengan laporan keuangan sehingga dapat membuat dan mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Provinsi Maluku Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Provinsi Maluku Utara adalah 31 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 31 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8  
Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA/B-W

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	03	Ditjen Tan.Pangan	-	-	1	7	8
2	04	Ditjen Hortikultura	-	-	1	-	1
3	05	Ditjen Perkebunan	-	-	1	4	6
4	06	Dit.Peternakan	-	-	1	1	2
5	07	Ditjen PPHP	-	-	1	1	2
6	08	Ditjen PSP	-	-	1	1	2
7	09	Badan Litbang	-	1	-	-	1
8	10	Badan SDM	-	-	1	-	1
9	11	Badan Ket.Pang	-	-	1	7	8
10	12	Badan Karantina	-	1	-	-	1
JUMLAH				2	8	21	31

Tabel 9

**DAFTAR SATKER UAPPA/B-W PROVINSI MALUKU UTARA TA. 2013**

NO	PROV/KAB/KOTA	UN IT	KD SATKER	NAMA SATKER	KW GN
1		09	450862	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Maluku Utara	KD
2		12	649441	Balai Karantina Pertanian Klas II Ternate	KD
3	PROVINSI	03	289073	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
4	MALUKU UTARA	04	289034	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
5		05	289035	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
6		06	289036	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
7		07	289037	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
8		08	289038	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
9		10	289169	Sekretariat BKP3K Prov. Malut	DK
10	PROV. MALUT	11	289039	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	DK
11		03	289073	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	TP
12		05	289035	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	TP
13		06	289036	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	TP
14		07	289037	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	TP
15		08	289038	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	TP
16		11	289039	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	TP
17	KAB. HALTENG	03	289186	Dinas Pertanian & Peternakan Halteng	TP
18		05	289181	Dinas Perkebunan Kab. Halteng	TP
19		11	289184	Badan Peny. & Ket. Pangan Kab. Halteng	TP
20	KAB. HALUT	03	289077	Dinas Pertanian Kab. Halut	TP
21		05	289044	Dinas Pertanian Kab. Halut	TP
22		11	289191	Badan Peny. & Ket. Pangan Kab. Halut	TP
23	KAB. HALSEL	03	289078	Dinas Pertanian & Peternakan Halsel	TP
24		11	289048	Dinas Pertanian & Peternakan Halsel	TP
25	KAB. KEP. SULA	11	289052	Dinas Pertanian & Ket. Pang Kab. Kep. Sula	TP
26	KAB. HALTIM	03	289206	Dinas Pertanian & Peternakan Haltim	TP
27		11	289055	Dinas Pertanian & Ket. Pang Haltim	TP
28	KAB. HALBAR	03	289083	Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	TP
29		05	289056	Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	TP
30		11	289058	Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	TP
31	KAB. MOROTAI	03	289087	Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan Kab. Pulau Morotai	TP

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta adalah sebagai berikut:

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Pendapatan*

##### (1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Belanja*

##### (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Aset

### (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

#### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada



masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

#### Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

#### (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Ekuitas Dana*

**(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

**(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 10  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	0%

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyusutan  
Aset Tetap

#### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 11.

*Tabel 11  
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lancar  
Rp19.097.756.115

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp19.097.756.115. dan Rp5.999.506.858.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar Lingkup UAPPA/B-W Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 28,800,000	Rp 4,000,000
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 1,242,503	Rp 10,422,702
4	Belanja Dibayar di Muka		
5	Piutang Bukan Pajak		
6	Bag Lancar Tagihan TA		
7	Bag Lancar Tagihan TP/TGR		
8	Persediaan	Rp 19,067,713,612	Rp 5,985,084,158
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19,097,756,115</b>	<b>Rp 5,999,506,860</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp28.800.000.

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp28.800.000. dan Rp4.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2013 dan 2012

No	UAPPABW	Jenis	Tahun 2013	Tahun 2012
1	Satker Dinas Pertanian Pulau Morotai	Uang Tunai	Rp 28,800,000	Rp -
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 28,800,000</b>	<b>Rp 4,000,000</b>

Kas di Bendahara pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara.

Kas di Bendahara  
Penerima Rp0.

### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Penerimaan tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20  
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker

(dalam rupiah)

No	Uraian Satker	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.			
2.			
	<b>Total</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Kas di Bendahara pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp1.242.503

### C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.242.503 dan Rp10.422.702. yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per satker tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker TA 2013

No	Uraian Satker	Jenis Transaksi	Jumlah
1	Dinas Pertanian Prov. 03 289073 dk	- Sisa LS yang belum di bayar	Rp 1,000,000
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>Rp 1,000,000</b>
2	Dinas Pertanian Prov 07 289037 TP	- Sisa LS yang belum di bayar	Rp 54,700
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>Rp 54,700</b>
3	Dinas Pertanian Kab.Halsel	- Sisa LS yang belum di bayar	Rp 168,479
	<b>03 289078 TP</b>	<b>Sub Jumlah</b>	<b>Rp 168,479</b>
4	<b>03 289087 TP</b>	- Sisa LS yang belum di bayar	Rp 19,324
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1,242,503</b>

Jumlah tersebut di atas telah diselesaikan dengan melakukan penyetoran dan pendistribusian kepada pihak yang terkait.

Belanja Dibayar Di Muka  
Rp6.000.000

#### C.1.4 Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp6.000.000. dan Rp0. Belanja di bayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 23.

Tabel 23  
Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2013

No.	Keterangan	TA 2013	TA 2012
1	Listrik dan Telpon	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 6,000,000</b>	<b>Rp 6,000,000</b>

Rincian Belanja Dibayar di Muka per satker tersaji pada Tabel 24.



Tabel 24  
Rincian Belanja Dibayar di Muka per Satker TA 2013

Uraian Satker	Jenis Transaksi	TA 2013
BPTP	- Pembayaran Listrik/Telpon	Rp 6,000,000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>Rp 6,000,000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6,000,000</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp0.

### C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Bagian Lancar TPA Rp0

### C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0. Bagian Lancar Tagihan TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan rumah negara dan kendaraan dinas.

Bagian Lancar TGR Rp0

### C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

-

Persediaan  
Rp19.067.713.612.

### C.1.10 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp19.067.713.612 dan Rp5.985.064.156 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap  
Rp42.653.431.098

### C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp42.653.431.098 dan Rp59.769.046.657 yang merupakan aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Lingkup UAPPABW Maluku Utara per 31 Desember tersaji pada Tabel 25.

Tabel 25  
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2013	T.A. 2012
1	Tanah	13,260,401,850	13,260,401,850
2	Peralatan dan Mesin	22,552,521,333	19,970,397,150
3	Gedung dan Bangunan	24,867,569,484	24,084,932,494
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,922,184,166	2,375,759,216
5	Aset Tetap Lainnya	90,276,000	60,376,000
6	Akumulasi penyusutan	(20,994,371,725)	
<b>Jumlah</b>		<b>42,653,431,098</b>	<b>59,751,866,710</b>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>42,653,431,098</b>	<b>59,751,866,710</b>

Tanah  
Rp13.260.401.850

### C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp13.260.401.850 atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penialai kembali nilai tanah pada TA 2013.

Tanah seluas 279.000.000 m2 yang terletak di Jl Kebun Percobaan Bacan

Peralatan dan Mesin  
Rp22.552.521.333.

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp.22.552.521.333. dan Rp.19.970.397.150.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	
Mutasi tambah:	
- pembelian	
- hibah	
- reklasifikasi dari aset lainnya	
Mutasi kurang:	
- penghentian aset dari penggunaan	
- penghapusan	
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp0</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari Pembelian

1	Alat Angkutan Darat Bermotor	
2	Alat Rumah Tangga	
3	Komputer Unit	
4	Peralatan Komputer	
5	Alat Komunikasi	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp -</b>

b. Transaksi Penambahan dari Hibah berupa Alat Rumah Tangga sebesar Rp

c. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Aset Lainnya berupa Komputer Unit sebesar Rp.

d. Transaksi Pengurangan dari penghentian aset dari penggunaan operasional berupa Alat Rumah Tangga sebesar Rp.

e. Transaksi Pengurangan dari penghapusan aset berupa Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.

Rincian set tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan  
Rp24.867.569.484.

**C.2.3 Gedung dan Bangunan**

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp.24.867.569.484. dan Rp.24.084.932.484.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	
Mutasi tambah:	
- Pembelian	
- koreksi pencatatan nilai	
Mutasi kurang:	
- koreksi pencatatan nilai	
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp -</b>

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:

a. Transaksi Penambahan dari pembelian berupa renovasi Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.

b. Transaksi Penambahan dari koreksi pencatatan nilai atas Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.

c. Transaksi Pengurangan dari koreksi pencatatan nilai atas Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp2.922.184.166

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.2.922.184.166. dan Rp.2.375.759.216. Mutasi transaksi terhadap aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	-

Transaksi mutasi penambahan terhadap aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa

1. Jaringan Telepon sebesar Rp0.
2. Jaringan Lain sebesar Rp0.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp.90.276.000.

#### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp.90.276.000. dan Rp.60.376.000. yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan.

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2013</b>	-

Transaksi mutasi penambahan terhadap aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam  
Pengerjaan Rp

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.20.994.371.725

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 adalah Rp20.994.371.725.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 26.

Tabel 26  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin			
2	Gedung dan Bangunan			
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya			
Akumulasi Penyusutan		Rp	- Rp	- Rp

Tuntutan  
Perbendaharaan Rp

### C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 27.

Tabel 27  
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Satker	TA 2013	TA 2012
1				
2				
3				
4				
Jumlah			Rp	- Rp

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	
Mutasi tambah:	
- Penambahan RP/TGR	Rp -
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp -</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tidak ada penambahan transaksi TP/TGR
- Mutasi kurang sebesar Rp0. merupakan reklasifikasi ke Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

Penyisihan Piutang tak  
Tertagih - Tuntutan  
Perbendaharaan Rp0

### C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur tersaji pada Tabel 28.

Tabel 28  
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Total</b>				<b>-</b>

Aset Lainnya  
Rp.67.617.633

### C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp67.617.633. dan Rp.67.617.633. yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 29.

Tabel 29  
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	Aset Tak Berwujud	Rp 67,617,633	Rp 67,617,633
2	Aset Lain-Lain	Rp 208,152,334	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 275,769,967</b>	<b>Rp 67,617,633</b>
	Akumulasi Penyusutan	Rp (208,152,334)	
<b>Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Des 2013</b>		<b>Rp 67,617,633</b>	<b>Rp 67,617,633</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp67.617.633

#### C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp67.617.633 dan Rp67.617.633. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup UAPPABW Provinsi Maluku Utara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun Rincian ATB per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 30.

Tabel 30  
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Satker	Uraian	Nilai
1	BPTP Maluku Utara	Aplikasi Intra Data	Rp 67,617,633
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 67,617,633</b>

Aset Lain-Lain  
Rp.208.152.334

#### C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp208.152.334. dan Rp0. yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor BPTP Maluku Utara dan pada akhir 2013 telah di hapus dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	
<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp -</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi penambahan sebesar Rp0 merupakan hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap akibat rusak berat berupa Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Bengkel Mesin
- Mutasi pengurangan sebesar Rp0. merupakan hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap akibat penggunaan kembali berupa Komputer Unit
- Mutasi pengurangan sebesar Rp0. merupakan penghapusan Aset Tetap

berupa Alat Angkutan Darat Bermotor  
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

## KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp48.218.003

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp48.218.003. dan Rp29.013.436.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 31.

Tabel 31  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 19,418,003	
2	Uang Muka dari KPPN	Rp 28,800,000	Rp 4,000,000
3	Pendapatan yang Ditangguhkan		
4	Pendapatan Diterima di Muka		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 48,218,003</b>	<b>Rp 4,000,000</b>

utang kepada Pihak  
Ketiga Rp1.242.503

#### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.242.503. dan Rp10.422.702.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Pihak Ketiga pada disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	TA 2013	TA 2012
1	LS Bendahara yg belum dibayar	Rp 1,242,503	Rp 1,042,702
	<b>Total</b>	<b>Rp 1,242,503</b>	<b>Rp 1,042,702</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp28.800.000

#### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp28.800.000. dan Rp 4.000.000

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal



pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN pada tanggal pelaporan disajikan pada satker Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pulau Morotai.

## EKUITAS

*Ekuitas Dana Lancar*  
Rp19.097.756.115

### C.6. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 33.

Tabel 33  
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No.	Aset Lancar	TA 2013	TA 2012
1	Kas di bendahara	Rp 28,800,000	Rp 4,000,000
2	Cadangan Persediaan	Rp 19,067,713,612	Rp 5,985,084,156
3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek		Rp 6,000,000
4	Kas lain setara kas	Rp 1,242,503	Rp 10,422,702
5	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima		
6	Barang/Jasa yang Masih harus Diserahkan		Rp (195,562,500)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19,097,756,115</b>	<b>Rp 5,809,944,358</b>

*Cadangan Persediaan*  
Rp19.067.713.612

#### C.6.1 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp19.067.713.612. dan Rp5.985.084.156

*Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek* Rp 6.000.000

#### C.6.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing tersaji minus sebesar Rp6.000.000. dan Rp6.000.000. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Belanja/Jasa yang Masih Harus Diserahkan negatif*  
Rp0

#### C.6.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing disajikan minus sebesar Rp0 dan minus Rp0. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

*Diinvestasikan dalam  
Aset Tetap  
Rp42.721.048.731*

## **C.7 Ekuitas Dana Investasi**

### **C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp42.721.048.731. dan Rp59.769.046.657. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Diinvestasikan dalam  
Aset Lainnya  
Rp67.617.633*

### **C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp67.617.633. dan Rp67.617.633. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

### **D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL**

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran .

### **D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

.

**Lampiran A1**

**BAGIAN ANGGARAN 018  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



**NERACA DAN LRA TUGAS PEMBANTUAN  
UAPPABW MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013**